

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, *et.al*, 2019, *Membedah Kontruksi Buku 1 Rancangan KUHP*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenter, Jakarta.
- Amnesty International, 2020, *Laporan Global Amnesty: International Hukuman Dan Eksekusi Mati 2020*, Laporan Tahunan, Amesty International, Jakarta
- Arba'I, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta.
- Bemmelen, Van, Ons Strafrecht I, 1979, *Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Penerbit H.D. Tjeenk Willink Aephen aan den Rijn, Holland
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu.,1984, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Llu, Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland.
- ICJR, 2007, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*, InstituteCriminal Justice Reform, Jakarta Selatan
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah yang Meragukan*. Institute Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3*. Institute Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Ketentuan dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Imparsial, 2010, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2008, *Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media, Jakarta



- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif*, PT. Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Rukmono, Bambang Sugeng, 2006, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- S, H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuasnsa Aulia, Bandung.
- Schabas, William A., 2002, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, New York
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1982, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta
- Sughandi, R., 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3615)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

Universal Declaration of Humans Rights (Deklarasi Universal HAM)

Economic and Social Council Resolution 1984/50 of 25 May 1984

Economic and Social Council Resolution 1989/64 of 24 May 1989

### **C. Jurnal**

Agustinus, Samuel, *et al.*, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.4, 2016.

Anwar, M., "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati", *Jendela Hukum*, Vol 4, No. 135742, 2011.

Arwansyah, Leo, *et.al*, Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, "Batas Waktu Pelaksanaan, Vol.1, No. 3, 2020.

Chandra, Septa "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pemnabaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.2, No.2, Agustus 2013.



- Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira. "Konsep Pembaharuan Pidana Mati dalam Rancangan Kuhp." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.2, No. 2, 2018.
- Efendi, Roni, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pidana." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Efryan RT., Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964", *Lex Crimen*, Vol.6, No.1, Februari 2017
- Elanora, Fransiska Novita, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Majalah Ilmiah Widya*, 2012.
- Hamenda, Veive Large, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol.2, No.1, 2013.
- Hudson, Patrick, "Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Rights under International Law", *EJIL*, Vol. 11, No. 4, 2000.
- Hwian Christianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No. 1, April 2009.
- Kenedi, John, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2, No. 1, 2018.
- Khasan, M., "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6, No.1, 2017.
- KontraS, "Praktek Hukuman Mati, Matinya Hukum Nurani", *Berita Kontras*, 2005.
- Lamandasa, Raimond Flora, penegekan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Marwin, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *ASAS*, Vol.11, No.1, 2019.
- Mukantardjo, R. S., "Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.2, No. 1, 2018.



- P., Aista Wisnu dan Sutanti, R. D., “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3,2020.
- Putra, A. W., dan Sutanti, R. D, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, 2020.
- Ramdan, A., Ramadhani, R. H., dan Susanto, M, “Kebijakan Pidana Mati Dalam RUU-HP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM”. *Arena Hukum*, Vol.11, No.3, 2018.
- Rasad, F., “Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Mengubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara”, *Jurnal HAM*, Vol.12, No.1, 2021.
- Rifai, Eddy, "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law." *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Sambas, N., “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia”, *Syar Hukum*, Vol.9, No. 3, 2007.
- Soponyono, E., dan Rahayu, S. A., “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.4, 2016.
- Sunarto, Gunawan Jatmiko, dan Leny Oktavia, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana mati (Studi Kasus Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas 1 A Raja Basa Bandar Lampung)”, *Jurnal Poenale*, Vol. 7, No.1, Februari 2019
- SuparDjaja, Komariah Emong, “Permasalahan Pidana Mati di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4, Desember 2007.
- Susanto, Mei dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 2-3/PUU-V/2007”, *Jurnal Yudisial*, Vol 10, No. 2, September 2017.



Usman, “Analisis Perkembangan Teori”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Wibawa, I., “Implementasi asas kepastian hukum yang berkeadilan berdasar cita hukum bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 1, 2018

Zaini, I., & NPM, S., “Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Pencarian Kepastian Hukum”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.3, 2013

#### **D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Ahmad Syahrin, 2013, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Hukum, UIN Alauddin, Makassar

Malik, R. S., 2016, “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Anggota TNI Inisial (Mai) Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Disertasi*, Program doctor Fakultas Hukum Univeristas Pasundan, Bandung.

Sari, E. O., 2009, “Hukuman Mati Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 176 K/Pid/1998)”, *Master's thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Yoisangadji, Iskandar, 2014, “Hukuman Mati Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Prespektif HAM”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

#### **E. Internet**

Ali, “MK Tolak Permohonan Judicial Review Amrozi Cs”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20330/mk-tolak-permohonan-judicial-review-amrozi-cs/>.

Amensty International, “Laporan Hukuman Mati 2020: Vonis hukuman mati di Indonesia melonjak di tengah pandemi”, <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2020-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-di-tengah-pandemi/>.



Amnesty International, "Death penalty in 2020: Facts and figures", <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/death-penalty-in-2020-facts-and-figures/#:~:text=At%20the%20end%20of%202020%2C%20at%20least%2028%2C567%20people%20were,years%20of%20age%20in%20Iran.>

BBC News, Filep Karma bebas, aparat di Papua akan monitor, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151119\\_indonesia\\_filep\\_monitor](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151119_indonesia_filep_monitor).

BESAR, "Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>.

Dalu, Dominikus, "Jalan Terjal Kaum Abolisionis di Indonesia", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--jalan-terjal-kaum-abolisionis-di-indonesia>.

Detik News, "Kejagung Lirik Suntik Mati", <https://news.detik.com/berita/d-754743/kejagung-lirik-suntik-mati>.

Huda, Chairul, Eksekusi Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, <https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/>

ICJR, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik", <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

\_\_\_\_\_, "Pemerintah Harus Konsisten soal "Jalan Tengah" Dalam Hukuman Mati di RKUHP", <https://icjr.or.id/icjr-pemerintah-harus-konsisten-soal-jalan-tengah-dalam-hukuman-mati-di-rkuhp/>.

\_\_\_\_\_, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK", <https://icjr.or.id/putusan-mahkamah-konstitusi-mk-soal-grasi-harus-jadi-patokan-rencana-pengajuan-fatwa-ke-mahkamah-agung-jangan-mengacaukan-hak-terpidana-mati-berdasarkan-putusan-mk/>.

ISHR, "Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment", <https://ishr.ch/latest-updates/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading/>.



Komnas HAM, “Komnas HAM Kritisi RKUHP”,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/5/1132/komnas-ham-kritisi-rkuhp.html>,

\_\_\_\_\_, “Menyoal Pentingnya Deret Tunggu Terpidana Hukuman Mati”,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/13/1595/menyoal-pentingnya-deret-tunggu-terpidana-hukuman-mati.html>

Kompas, "Kejaksaaan Agung Pastikan Terpidana Mati Tak Lagi Punya Hak Grasi", <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/11/07030031/Kejaksaaan.Aguung.Pastikan.Terpidana.Mati.Tak.Lagi.Punya.Hak.Grasi>.

\_\_\_\_\_, “Imparsial Nilai Eksekusi Mati Tak Mampu Timbulkan Efek Jera”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/09/17393181/Imparsial.Nilai.Eksekusi.Mati.Tak.Mampu.Timbulkan.Efek.Jera>.

\_\_\_\_\_, “Hingga Saat Terakhir, Rodrigo Gualarte Tak Sadar Akan Dieksekusi”,  
<http://internasional.kompas.com/read/2015/04/30/11464971/Hingga.Saat.Terakhir.Rodrigo.Gualarte.Tak.Sadar.Akan.Dieksekusi>.

\_\_\_\_\_, “ICJR: 60 Terpidana Mati tunggu Waktu Eksekusi Lebih dari 10 Tahun”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun?page=all>

KontraS, “Hukuman Mati dengan Gantung atau Suntik”,  
<https://kontras.org/2005/03/30/hukuman-mati-dengan-gantung-atau-suntik/>

\_\_\_\_\_, “Praktek Hukuman Mati Matinya Hukum Nurani”,  
<http://kontras.org/backup/buletin/indo/2005-03-04.pdf>.

\_\_\_\_\_, “Menolak Eksekusi Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan”,  
<https://kontras.org/2016/05/12/menolak-eksekusi-mati-dan-kebijakan-yang-tidak-transparan/>

Martra Santos Pais, “The rights of the child when a parent is sentenced to the death penalty or executed”, <https://violenceagainstchildren.un.org/news/rights-child-when-parent-sentenced-death-penalty-or-executed>.

Nadlir, Moh., “LBH: Rodrigo Gualarte Idap Gangguan Jiwa Sejak 10 Tahun “,  
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/615663-lbh-rodriigo-gualarte-idap-gangguan-jiwa-sejak-10-tahun>.

Octavia, Yosua, “Tarik Pidana Mati Dalam RKUHP!”, LBH Masyarakat,  
<https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-tarik-pidana-mati-dalam-rkuhp/>.



Rancangan Undang-Undang Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

The HATI Coalition, "The Death Penalty is Not The Solution",  
<https://imparsial.org/en/hukuman-mati-bukan-solus/>

Tribun News, Kejaksaan Agung: Terpidana Mati yang Belum Ajukan Grasi Tidak Hambat Eksekusi,  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/kejaksaan-agung-terpidana-mati-yang-belum-ajukan-grasi-tidak-hambat-eksekusi>.

Yasin, Muhammad, "Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati ala Profesor Muladi",  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8cdd3c7c243/jalan-tengah-hukuman-pidana-mati-ala-profesor-muladi?page=1>

## 6) Makalah

Ulfah, Maia "Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP." *Makalah*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Islam, 2019.

## 7) Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 28 Maret 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Juli 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Oktober 2008;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Oktober 2007;

Putusan No. 38/ Pid.Sus/2019/PT. MTR



Soering v. The United Kingdom Judgment, Application No 14038/88 ECHR, 07  
July 1989